

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA RAWA KUCING KOTA TANGERANG

Alwin Rizki Putra¹, Feri Harits², Devina Ratna Suryani³

^{1,2,3}Universitas Yuppentek Indonesia

Email: alwinrizki11@gmail.com¹, feriharits@gmail.com², devina@uyi.ac.id³

Abstract: *Waste management is a critical issue in urban areas that requires effective and sustainable public policies. The Rawa Kucing Landfill (TPA Rawa Kucing) in Tangerang City plays a strategic role as the final disposal site in reducing the environmental and social impacts of increasing daily waste volumes. This study aims to evaluate waste management policies implemented at TPA Rawa Kucing based on policy evaluation indicators proposed by Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research employed a qualitative approach using data collection techniques including interviews, field observations, and documentation studies. Research informants consisted of landfill officers, local community members, neighborhood leaders, and the Head of the TPA Rawa Kucing Management Unit. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis to obtain a comprehensive understanding of policy implementation. The results indicate that waste management policies at TPA Rawa Kucing have shown positive achievements in terms of effectiveness and efficiency. However, significant challenges remain in aspects of adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The increasing volume of waste, limited landfill capacity, low community participation, and insufficient infrastructure constitute the main obstacles. Therefore, strengthening public education programs, optimizing the implementation of the 3R principles (reduce, reuse, recycle), improving infrastructure, and enhancing collaboration among government, community, and private sectors are essential to achieve a sustainable waste management system.*

Keywords: *Policy Evaluation, Waste Management, Rawa Kucing Landfill, Public Policy, Environment.*

Abstrak: Pengelolaan sampah merupakan permasalahan krusial di wilayah perkotaan yang memerlukan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. TPA Rawa Kucing Kota Tangerang berperan strategis sebagai tempat pemrosesan akhir dalam menekan dampak lingkungan dan sosial akibat peningkatan volume sampah harian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing berdasarkan indikator evaluasi kebijakan publik menurut Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi petugas TPA, masyarakat sekitar, ketua RT, serta

Kepala UPT TPA Rawa Kucing. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing telah menunjukkan capaian positif dalam aspek efektivitas dan efisiensi, namun masih menghadapi kendala pada aspek kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Peningkatan volume sampah, keterbatasan daya tampung TPA, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program edukasi masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), peningkatan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA Rawa Kucing, Kebijakan Publik, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Masalah sampah perkotaan di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat serius. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pola hidup konsumtif tentu diikuti meningkatnya produksi sampah. Di kota-kota besar sampah menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan (Damanik, 2020). Sampah dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah sebagai sumber penyakit, seperti diare, tifus dan penyakit-penyakit infeksi, dan lain-lain, maka dari itu perlu dilakukannya penanganan sampah yang tepat (Adiprasetyo, 2019).

Pengelolaan sampah merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Tangerang. TPA Rawa Kucing sebagai salah satu tempat pemrosesan akhir (TPA) di kota ini memegang peranan vital dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, pada tahun 2022, volume sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing mencapai 1.200 ton per hari, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengelolaan yang efektif dan efisien semakin mendesak. Kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA Rawa Kucing perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan Perwal No 102 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga .

Tabel 1

Data Tonase Sampah Dinas Lingkungan Hidup TPA Rawa Kucing Kota Tangerang Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Tahun	474,846,040	514,571,720	514,581,740

Sumber: UPTD TPA Rawa Kucing, 2024

Berdasarkan data dari UPTD TPA Rawa Kucing , data tonase sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing pada tahun 2022 sebanyak 474,846,040, ditahun 2023 sebanyak 514,571,720 dan ditahun 2024 sebanyak 514,581,740. Dari tahun ketahun kapasitas sampah di TPA Rawa Kucing semakin banyak setiap harinya dan terus meningkat sedangkan daya tampung TPA Rawa Kucing yang terbatas, luas area TPA Rawa Kucing hampir 35 hektare atau 34,8 hektare yang menampung sampah dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan , sekitar 80% area TPA Rawa Kucing sudah digunakan hanya sisa 20% dari 34,8 hektare, bila penanganan sampah di TPA Rawa Kucing tidak dikelola dengan baik, masalah sampah menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun di Kota Akhlaqul Karimah .

Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dalam mencapai tujuan, tetapi juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya, kecukupan dalam menyelesaikan masalah, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dunn (2015) mengusulkan indikator evaluasi kunci yang dapat digunakan dalam proses ini. Dengan menggunakan indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja kebijakan yang diterapkan di TPA Rawa Kucing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah yang ada, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas TPA Rawa kucing 1 Orang , masyarakat sekitar 3 orang , ketua RT, serta Kepala UPT.TPA Rawa Kucing . Observasi dilakukan di lokasi TPA Rawa Kucing untuk mendapatkan informasi langsung mengenai

proses pengelolaan sampah. Selain itu, studi dokumentasi mencakup analisis dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan data statistik yang relevan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator evaluasi yang diusulkan oleh Dunn. Indikator tersebut mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menganalisis data berdasarkan indikator-indikator ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks lokal dan peraturan yang berlaku, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan Perwal No. 102 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, hanya sekitar 30% masyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari (Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2022).

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing menunjukkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Ada 6 indikator menurut Dunn (2003) yang menjadi fokus untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota tangerang *Pertama*, Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu tujuan utama adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta meningkatkan tingkat daur ulang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai menunjukkan hasil yang positif.

Namun, efektivitas tidak hanya diukur dari penurunan volume sampah, tetapi juga dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Program edukasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti sosialisasi tentang pemilahan sampah di sumbernya, telah menjangkau lebih dari 10.000 rumah tangga di wilayah Tangerang. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden kini lebih memahami pentingnya pemilahan sampah, yang menjadi indikator positif dari efektivitas kebijakan ini (Dunn, 2018).

Walaupun terdapat kemajuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, terdapat gap antara tujuan yang ditetapkan dan realisasi di lapangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program ini.

Contoh kasus dari daerah lain, seperti Kota Bandung, menunjukkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Di Bandung, program "Sampahku Tanggung Jawabku" berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 80% dengan melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap pengelolaan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Bandung, 2022). Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Kota Tangerang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai efektivitas yang optimal. Penguatan program edukasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. *Kedua*, Efisiensi dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dapat dilihat dari rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Berdasarkan data dari Perwal No. 102 Tahun 2023, biaya operasional untuk pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing mencapai sekitar Rp 5 miliar per tahun. Namun, dengan adanya program daur ulang dan pengurangan volume sampah, diperkirakan pemerintah daerah dapat menghemat biaya pengelolaan hingga 30% dalam jangka panjang.

Salah satu indikator efisiensi adalah biaya per ton sampah yang dikelola. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup, biaya pengelolaan sampah per ton di TPA Rawa Kucing adalah sekitar Rp 500.000. Dengan meningkatnya volume daur ulang, biaya ini diperkirakan akan menurun seiring dengan berkurangnya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA.

Dalam konteks ini, efisiensi dapat dicapai melalui investasi dalam teknologi daur ulang yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mengurangi beban biaya operasional.

Namun, efisiensi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang diterapkan. Misalnya, jika pengurangan biaya dilakukan dengan mengorbankan kualitas layanan pengelolaan sampah, maka hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah penghematan biaya sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan.

Contoh dari kota-kota lain menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang efisien dapat memberikan hasil yang signifikan. Di Surabaya, misalnya, penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi berhasil menurunkan biaya operasional hingga 25% sambil meningkatkan tingkat daur ulang (Dinas Kebersihan Surabaya, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi yang optimal di TPA Rawa Kucing, perlu adanya analisis mendalam mengenai biaya dan manfaat dari setiap kebijakan yang diterapkan. Penggunaan teknologi yang tepat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai efisiensi yang diharapkan. Ketiga, Kecukupan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada. Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah, seperti peningkatan volume sampah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa rata-rata produksi sampah di Kota Tangerang mencapai 1.200 ton per hari, dengan TPA Rawa Kucing hanya mampu menampung sekitar 800 ton per hari, sehingga terjadi penumpukan sampah yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Kebijakan yang ada saat ini, meskipun telah dirancang untuk mengurangi volume sampah, masih belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas TPA dan memperkenalkan program daur ulang. Namun, implementasi program ini masih terbatas, dan banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah di sumbernya. Hal ini menunjukkan

bahwa masih ada kekurangan dalam kebijakan yang ada, yang perlu segera diatasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Contoh kasus dari Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Di Yogyakarta, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat berhasil mengurangi volume sampah hingga 40% dalam waktu satu tahun, berkat keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang (Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta, 2022). Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kecukupan kebijakan pengelolaan sampah.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dengan kondisi lapangan. Pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, untuk mencapai kecukupan dalam pengelolaan sampah, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa langkah positif yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada dengan lebih efektif. Keempat, Perataan dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing mencakup analisis distribusi akibat dari kebijakan tersebut di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan apakah kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, ataukah justru menciptakan ketimpangan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, terdapat perbedaan signifikan dalam akses terhadap layanan pengelolaan sampah antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan di Kota Tangerang.

Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pengelolaan sampah, sementara masyarakat di daerah pedesaan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dari kebijakan pengelolaan sampah. Sebagai contoh, di beberapa daerah pedesaan, pengumpulan sampah dilakukan hanya seminggu sekali, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Dalam upaya untuk menciptakan perataan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan frekuensi pengumpulan sampah di daerah yang kurang terlayani. Selain itu, program edukasi yang menyasar kelompok masyarakat yang lebih rentan juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Contoh dari kebijakan di negara lain, seperti di Swedia, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang adil dan merata dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif. Di Swedia, pemerintah mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai (Swedish Environmental Protection Agency, 2021). Ini menunjukkan bahwa perataan dalam pengelolaan sampah dapat dicapai dengan pendekatan yang tepat.

Dengan demikian, untuk mencapai perataan yang lebih baik dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai distribusi manfaat dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan preferensi semua kelompok masyarakat. Kelima, Responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan mampu merespons isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya informasi mengenai jadwal pengumpulan sampah dan cara pemilahan yang benar.

Kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, program sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendengarkan masukan dari masyarakat dan merespons dengan cepat terhadap keluhan yang ada.

Contoh dari daerah lain, seperti Kota Semarang, menunjukkan bahwa responsivitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi. Di Semarang, pemerintah kota meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait pengelolaan sampah dan mendapatkan informasi terkini mengenai jadwal pengumpulan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Semarang, 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan responsivitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sampah. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, responsivitas dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing perlu ditingkatkan melalui peningkatan komunikasi, penggunaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Keenam, Ketepatan (Appropriateness) dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah TPA Rawa Kucing mengukur seberapa relevan tujuan, strategi, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah/lembaga dengan kebutuhan nyata di lapangan serta dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat dan lingkungan. Ketepatan kebijakan pengelolaan sampah diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah perilaku masyarakat dan meminimalisir sampah di TPA, yang didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar administratif. Ketepatan tujuan dari pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing belum sepenuhnya tercapai dikarenakan volume Sampah terus meningkat dan makin menggunung mencapai ketinggian hampir 25 meter, luas lokasi pembuangan semakin menyipit, adanya pencemaran lingkungan baik udara ataupun tanah yang disebabkan oleh air Lindi artinya Tujuan dari Kebijakan pengelolaan Sampah Dengan prinsip 3R,(reduse,reuse,recycle) belum sepenuhnya tepat walaupun prinsip - prinsip 3R sudah dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Efektivitas, efisiensi,

kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan merupakan indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, beberapa saran dapat diberikan untuk perbaikan di masa depan.

Pertama, perlu adanya peningkatan dalam program edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya daur ulang. Program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dan cara-cara untuk mendaur ulang. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi kembali anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah, agar lebih seimbang antara biaya operasional dan pendapatan dari pengelolaan sampah.

Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam program-program yang dilaksanakan. Keempat, perlu adanya pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk fasilitas daur ulang dan pengangkutan sampah yang efisien.

Terakhir, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2022. BPS.
- Damanik, J. (2020). Dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 85–92.
- Dinas Kebersihan Kota Surabaya. (2023). Laporan kinerja pengelolaan sampah Kota Surabaya tahun 2023. Pemerintah Kota Surabaya.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2022). Laporan tahunan pengelolaan sampah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2023). Laporan pengelolaan sampah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. (2022). Laporan tahunan pengelolaan sampah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang.

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2022). Laporan kinerja pengelolaan sampah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Hidayat, R., & Sari, D. (2019). Manajemen pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 33–44.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Pengelolaan sampah nasional*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Jakstranas pengelolaan sampah nasional*. KLHK.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). *Pedoman pengelolaan sampah perkotaan*. PUPR.
- Kusuma, H., & Yuliana, R. (2017). Dampak lingkungan TPA terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 67–75.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi*. Elex Media Komputindo.
- Pariatmono, M. (2015). *Pengelolaan sampah terpadu*. Andi.
- Putri, R. A., & Handayani, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(3), 123–132.
- Rahman, A., & Prasetyo, D. (2020). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 89–101.
- Sari, M., & Utami, P. (2020). Analisis sistem pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(1), 1–10.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Susanto, B. (2016). Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(2), 101–115.
- Suryani, A. S. (2018). Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Masalah Sosial*, 9(1), 1–15.
- Sutrisno, T., & Setyowati, N. (2018). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–56.

- Wahab, S. A. (2014). Analisis kebijakan publik: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori dan proses. Media Pressindo.
- Swedish Environmental Protection Agency. (2021). Waste management in Sweden annual report. Swedish EPA.